

REALISASI KEPEMIMPINAN ALI BIN ABI THALIB

Rahmat¹, Syamzan Syukur², Muh. Idris³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: rahmatsoi4968@gmail.com¹, syamzansyukur@uin-alauddin.ac.id²,
muhammad.idris@uin-alauddin.ac.id³

Received: October 01, 2025

Revised: November 24, 2025

Accepted: December 05, 2025

Abstract

This study is an effort to introduce the leadership of Ali bin Abi Talib through a descriptive narrative and analytical disclosure, both the principles of leadership, the challenges in carrying out duties as a ruler, and the actualization of his leadership in a contemporary perspective. In order to elaborate on the leadership of this caliph, this study uses historical methods and approaches with an emphasis on modern historiography. The results of this study show All bin Abi Talib as the fourth caliph, the successor to the leadership of the Prophet Muhammad (peace be upon him), he is considered a figure who actualizes the temporal leadership of the Messenger of Allah based on the concepts of fatanah, siddiq, amanah, and tablik. This is evident in the principles of leadership that he implemented. In carrying out his duties as a leader, he faced very heavy challenges as a legacy from his predecessors. However, with the firmness of holding on to leadership principles in governance, he became a figure worthy of emulation in the contemporary era filled with turmoil.

Keywords: Kepemimpinan; Ali bin Abi Thalib; Prinsip-prinsip; Tantangan; Kontemporer.

Abstrak

Kajian ini adalah upaya memperkenalkan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib melalui pengungkapan secara deskriptif naratif dan analitis, baik prinsip kepemimpinan, tantangan dalam menjalankan tugas sebagai penguasa maupun aktualisasi kepemimpinannya dalam perspektif kontemporer. Dalam rangka mengelaborasi kepemimpinan khalifah tersebut, kajian ini menggunakan metode dan pendekatan sejarah dengan penekanan historiografi modern. Dari hasil kajian ini menunjukkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat, pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad saw. beliau dianggap sosok yang mengaktualisasikan kepemimpinan temporal Rasulullah dengan berdasar pada konsep *fatanah*, *siddiq*, *amanah* dan *tablik*. Hal ini terlihat pada prinsip-prinsip kepemimpinan yang dijalankannya. Dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin beliau menghadapi tantangan yang amat berat sebagai warisan dari pendahulunya. Namun dengan keteguhan memegang prinsip kepemimpinan dalam menjalankan pemerintahan menjadikannya sosok yang patut ditiru pada era kontemporer yang penuh dengan pergolakan.

Kata Kunci: Kepemimpinan; Ali bin Abi Thalib; Prinsip-prinsip; Tantangan; Kontemporer.

Pendahuluan

Sejarah peradaban Islam telah merekam jejak Ali bin Abi Thalib. Ia merupakan salah satu figur yang menempati posisi yang sangat istimewa dan penuh keteladanan. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad saw. di samping itu ia juga merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan awal Islam, baik dari segi spiritual, intelektual, maupun kepemimpinan politik. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menandai sebuah fase penting dalam sejarah kekhalifahan Islam, yakni masa transisi dan gejolak sosial-politik yang kompleks pasca wafatnya Utsman bin Affan, khalifah ketiga Khulafa' al-Rasyidin.

Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah keempat pada tahun 656 M dalam situasi yang penuh ketegangan dan perpecahan di tubuh umat Islam. Ia mewarisi kekuasaan di tengah krisis politik yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan sebelumnya, terutama dalam hal nepotisme dan ketimpangan sosial. Tantangan besar ini menuntut Ali bin Abi Thalib untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga bijak secara moral dan spiritual. Kepemimpinannya menjadi sorotan utama karena keberaniannya dalam menegakkan prinsip keadilan, kesederhanaan, dan keberpihakan kepada rakyat kecil, meskipun harus berhadapan dengan oposisi politik yang kuat, seperti dari Muawiyah bin Abu Sufyan.¹

Pemikiran dan tindakan Ali dalam menjalankan pemerintahan juga memperlihatkan karakter kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai etika Islam. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak mudah terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan pribadi. Surat-surat dan pidatonya yang terdokumentasi dalam *Nahjul Balaghah* memberikan gambaran tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang ideal menurut Islam, seperti keadilan sosial, tanggung jawab moral, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ia juga menekankan pentingnya akhlak dalam kepemimpinan serta perlunya pemimpin untuk hidup sederhana dan tidak bermegah-megahan.²

Namun demikian, masa kekhalifahan Ali juga diwarnai dengan berbagai konflik internal umat Islam, seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin, yang kemudian memperparah fragmentasi politik dan menyebabkan munculnya kelompok-kelompok seperti Khawarij dan Syiah. Dalam konteks ini, kepemimpinan Ali menghadapi ujian besar, yakni menjaga keutuhan umat sembari tetap mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran yang diyakininya. Meski akhirnya wafat dalam tragedi pembunuhan, warisan pemikiran dan jejak kepemimpinan Ali bin Thalib tetap dikenang dan menjadi inspirasi bagi banyak kalangan hingga kini.

Kajian terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib telah banyak dilakukan oleh para sejarawan, ulama, dan pemikir Muslim. Literatur yang membahas tentang Ali bin Abi Thalib meliputi aspek sejarah, teologi, filsafat, serta kepemimpinan politik.

¹William Watt, Montgomer, Ali Ibn Abi Talib. In: Muhammad: Prophet and Statesman (Inggris: Oxford University Press, 1960).

²M. M. Sharif, *A History of Muslim Philosophy*, Vol. 1 & 2 (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1981).

Penelitian ini mengkaji literatur-literatur utama yang relevan untuk membentuk kerangka pemahaman komprehensif terhadap jejak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib.

Beberapa sumber literatur yang relevan dalam kajian ini yaitu, *Nahjul Balaghah*, *Muhammad: Prophet and Statesman*, *A History of Muslim Philosophy*, *Etika Kepemimpinan dalam Islam*.

Berdasarkan kajian literatur tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib tidak hanya bersifat historis, tetapi juga filosofis dan normatif. Ia menjadi model pemimpin yang mampu menjaga integritas, menolak kompromi terhadap ketidakadilan, serta menunjukkan keberanian moral dalam menghadapi tekanan sosial-politik. Literatur-literatur ini menjadi dasar yang kokoh dalam memahami karakter, kebijakan, dan warisan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, serta urgensinya untuk dikaji ulang dalam konteks tantangan kepemimpinan kontemporer.

Menelusuri jejak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, kita tidak hanya mempelajari sejarah seorang khalifah, tetapi juga menggali nilai-nilai universal tentang kepemimpinan yang berintegritas, berbasis moralitas, dan berpihak pada keadilan. Oleh karena itu, artikel ini berusaha mengangkat kembali sosok Ali bin Abi Thalib sebagai model kepemimpinan yang relevan untuk dijadikan teladan, khususnya dalam konteks zaman modern yang penuh tantangan etis dan krisis kepercayaan terhadap para pemimpin.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode dan pendekatan historis, data yang digunakan data kualitatif, data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dilakukan untuk menelusuri, memahami, dan mendeskripsikan jejak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib berdasarkan sumber-sumber historis dan literatur Islam klasik maupun modern. Dengan menggunakan metode dan pendekatan sejarah memungkinkan peneliti untuk menganalisis data secara mendalam dan interpretatif, dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan spiritual yang melatarbelakangi setiap kebijakan dan tindakan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib.³ Penelitian ini, tidak hanya menguraikan fakta sejarah secara deskriptif naratif dan analitis, tetapi juga berusaha menggali nilai-nilai kepemimpinan yang terkandung dalam praktik dan pemikiran Ali bin Abi Thalib, serta merefleksikannya dalam konteks kontemporer. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam kajian kepemimpinan Islam dan memperkaya khazanah pemikiran politik Islam yang berorientasi pada keelokan, etika dan keadilan.

Adapun langkah-langkah penelitian yaitu: Heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Heuristik dalam penelitian ini fokus pada studi kepustakaan; dilakukan dengan cara menelusuri dan menelaah literatur-literatur yang relevan, baik berupa buku sejarah, kitab klasik seperti *Nahjul Balaghah*,⁴ maupun karya-karya akademik kontemporer tentang sejarah Islam dan kepemimpinan. Sumber utama penelitian ini adalah teks-teks pidato, surat, dan ucapan Ali bin Abi Thalib yang terkandung dalam *Nahjul Balaghah*, sumber lainnya diperoleh dari karya-karya ilmiah

³Lexy J. Moleong, 'Metodologi Penelitian Kualitatif' (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), p. 89.

⁴Al-Sharif al-Radhi, 'Nahjul Balaghah' (Jakarta: Lentera, 2005), p. 49.

seperti tulisan W. Montgomery Watt, M.M. Sharif, dan sumber lain yang membahas kepemimpinan dalam konteks Islam.

Adapun kritik sumber penelitian ini, lebih menekankan pada kritik internal atau kritik berkaitan substansi narasi yang diungkapkan dalam sumber. Selanjutnya interpretasi dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, seperti keadilan, moralitas, spiritualitas, dan respons terhadap konflik politik. Analisis ini dilakukan secara sistematis dengan mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu, lalu memberi interpretasi atau menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya secara kontekstual.⁵ Selanjutnya sejarah dituliskan atau disusun kembali dengan corak historiografi modern.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib

Pembahasan ini mengulas nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, seperti keadilan, kesederhanaan, amanah, dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Dalam kitab *Nahjul Balaghah*, Ali bin Abi Thalib menekankan pentingnya pemimpin yang adil, tidak memihak, dan menjadikan kepemimpinan sebagai bentuk pengabdian, bukan sarana kekuasaan. Ia juga menolak nepotisme dan menunjukkan ketegasan dalam menjalankan hukum, termasuk terhadap keluarga atau sahabat dekatnya.

Ali bin Abi Thalib (599–661 M), khalifah keempat dalam Khulafā' al-Rāsyidīn, dikenal sebagai sosok pemimpin yang memadukan kecerdasan intelektual, keberanian militer, dan integritas moral yang tinggi.⁶ Prinsip-prinsip kepemimpinannya menjadi rujukan penting dalam kajian sejarah politik Islam dan etika pemerintahan. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib tidak hanya bersifat politis, tetapi juga mengandung dimensi spiritual yang berlandaskan pada nilai-nilai al-Qur'an dan sunnah. Berikut ini prinsip-prinsip kepemimpinan Ali bin Abi Thalib.

1. Prinsip Keadilan ('*adl*)

Ali menegaskan bahwa keadilan adalah fondasi kekuasaan, dan tanpa keadilan, kekuasaan akan runtuh. Dalam suratnya kepada Malik al-Asytar, gubernur Mesir, Ali menekankan agar pejabat pemerintahan memperlakukan rakyat secara setara tanpa memandang status sosial atau afiliasi politik.⁷ Dalam suratnya kepada Malik al-Ashtar, seorang Gubernur Mesir, Ali menekankan:

“Hendaklah engkau berlaku adil terhadap rakyatmu, baik terhadap diri sendiri, keluarga maupun terhadap orang-orang yang dekat denganmu.”⁸

Bagi Ali bin Abi Thalib, keadilan adalah pilar utama tegaknya pemerintahan, dan tanpa itu, negara akan runtuh secara moral. Dalam kitab *Nahjul Balaghah*, Ali bin Abi Thalib menekankan pentingnya pemimpin yang adil, tidak memihak, dan

⁵Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2013).

⁶Syamzan Syukur, *Sukses Kepemimpinan dan Transformasi Kekuatan Politik Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin* (Makassar: Alauddin University Press, 2020).

⁷Malik al-Asytar, *Nahjul Al-Balaghah* (Qum: World Organization for Islamic Services, 1996).

⁸Radhi.

menjadikan kepemimpinan sebagai bentuk pengabdian, bukan sarana kekuasaan. Ali bin Abi Thalib juga menolak nepotisme dan menunjukkan ketegasan dalam menjalankan hukum, termasuk terhadap keluarga atau sahabat dekatnya. Keadilan menurut Ali bin Abi Thalib mencakup perlindungan terhadap hak-hak minoritas, penegakan hukum tanpa diskriminasi, dan distribusi kekayaan negara secara proporsional.

2. Prinsip Amanah

Ali memandang jabatan sebagai titipan, bukan hak istimewa yang dapat disalahgunakan. Ia menolak keras praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Dalam khutbahnya, Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa penguasa yang mengkhianati amanah rakyat akan kehilangan keberkahan kepemimpinan.⁹ Oleh karena itu, ia menempatkan orang-orang yang dikenal jujur dan berintegritas pada posisi strategis.

Pasca dibi'at menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib memulihkan kondisi politik warisan Khalifah Utsman bin Affan yang dianggap penuh dengan nuansa kolusi, korupsi dan nepotisme. Adapun kebijakan-kebijakan Ali bin Abi Thalib, antara lain:

- a. Menganulir jabatan-jabatan strategis yang diduduki keluarga-keluarga Utsman bin Affan.
- b. Mengembalikan tanah-tanah negara yang dibagi-bagikan ke keluarga Utsman bin Affan.

Kebijakan ini penuh dengan risiko serta menciptakan musuh baru bagi Ali terutama datang dari keluarga Utsman bin Affan. Tapi rupanya Ali bin Abi Thalib berani mengambil risiko ini.

Kedua persoalan tersebut di atas, menurut Ali bin Abi Thalib menjadi biang kerok fitnah *al kubra* dan muncul perpecahan serta demonstrasi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan.

3. Prinsip Kesederhanaan (*zuhd*)

Meskipun menjabat sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib hidup dengan penuh kesahajaan. Ia menolak kemewahan pribadi, bahkan terkenal mengenakan pakaian sederhana dan makan makanan yang sama dengan rakyat jelata.¹⁰ Kesederhanaan ini berfungsi sebagai teladan moral, mengingatkan pemimpin untuk tidak terjebak dalam gaya hidup hedonis yang menjauhkan diri dari realitas sosial. Dalam sebuah pidatonya, Ali bin Abi Thalib berkata,

“Apakah kalian mengira aku akan memakan makanan terbaik padahal di Hijaz dan Yamamah ada orang-orang yang belum pernah kenyang makan roti?”¹¹

Kebijakan Ali di atas, menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib tidak hanya berbicara tentang etika kepemimpinan, tetapi juga mencontohkannya secara langsung.

4. Prinsip Musyawarah (*syura*)

Ali bin Abi Thalib menganggap bahwa pengambilan keputusan yang baik harus melibatkan pertimbangan bersama. Dalam praktiknya, ia mengundang para sahabat, ulama, dan tokoh masyarakat untuk memberikan masukan sebelum menetapkan

⁹Ibn Abi Al-Hadid, *Sharh Nahj Al-Balāghah* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, 1960).

¹⁰M.A. Shaban, *Islamic History: A New Interpretation* (Cambridge: Cambridge University Press, 1971).

¹¹Radhi.

kebijakan.¹²Prinsip ini tidak hanya menciptakan legitimasi politik, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial.

Meskipun Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai figur yang memiliki otoritas spiritual tinggi, ia tidak otoriter. Ia menghargai masukan dari rakyat dan para sahabatnya. Dalam banyak keputusan politik dan sosial, Ali bin Abi Thalib melibatkan pendapat orang-orang terpercaya, dan tidak ragu menerima kritik jika hal tersebut membawa kebaikan bersama.¹³ Dengan karakter seperti ini merupakan salah barometer berlangsungnya kepemimpinan Khulafa' al-Rasyidin secara demokratis.

5. Prinsip Ketegasan dalam Menegakkan Hukum

Ali dikenal tegas menghadapi pemberontakan dan pelanggaran hukum, meskipun dilakukan oleh orang terdekat sekalipun. Ia memandang bahwa hukum adalah instrumen untuk menjaga ketertiban dan keadilan, bukan alat untuk mempertahankan kekuasaan pribadi.¹⁴ Dalam hal ini, Ali menunjukkan bahwa ketegasan harus berjalan beriringan dengan kasih sayang dan kebijaksanaan.

Prinsip-prinsip Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib di atas, menunjukkan model ideal dalam tradisi Islam: memadukan moralitas, intelektualitas, dan keberanian. Sejarawan modern memandang bahwa warisan kepemimpinan Ali memberikan inspirasi bagi pembentukan pemerintahan yang berbasis nilai, bukan sekadar kekuatan militer atau kekuasaan politik.¹⁵

Prinsip-prinsip kepemimpinan Ali bin Abi Thalib tersebut di atas relevan hingga kini sebagai pedoman etika politik, terutama dalam menghadapi tantangan korupsi, ketidakadilan, dan krisis kepercayaan publik.

Tantangan Ali bin Abi Thalib dalam Merealisasikan Kepemimpinannya

Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib berlangsung dalam periode paling turbulen dalam sejarah awal Islam. Berkuasa sejak tahun 656 M hingga wafatnya pada tahun 661 M, masa kekhalifahan Ali tidak hanya ditandai oleh reformasi moral dan spiritual, tetapi juga oleh krisis politik yang mendalam dan perpecahan sosial yang tajam. Tantangan politik dan sosial yang dihadapi merupakan cerminan dari kompleksitas situasi umat pasca wafatnya Rasulullah saw. dan meningkatnya ketegangan antar kelompok dalam masyarakat Islam.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Ali bin Abi Thalib adalah legitimasi politik. Setelah terbunuhnya khalifah ketiga, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah dalam situasi yang sangat genting. Sebagian besar masyarakat Madinah mendukung pengangkatannya, tetapi tidak semua pihak menerima legitimasinya dengan lapang dada. Tokoh-tokoh seperti Aisyah binti Abu Bakar, Thalhah, dan Zubair, yang sebelumnya menjadi bagian dari elite sahabat Nabi, meragukan proses pengangkatan Ali dan menuntut keadilan atas kematian Utsman. Ketegangan ini akhirnya memicu Perang Jamal, yang menjadi perang saudara pertama dalam sejarah Islam.

Selain Perang Jamal, Ali bin Abi Thalib juga menghadapi tantangan besar dari Muawiyah bin Abu Sufyan, Gubernur Syam dan kerabat Utsman, yang menolak mem-

¹²W Montgomery Watt, *The Formative Period of Islamic Thought* (Oxford: Oneworld, 1998).

¹³Sharif.

¹⁴Hugh Kennedy, *The Prophet and the Age of the Caliphates* (London: Longman, 2004).

¹⁵Reza Shah-Kazemi, *Justice and Remembrance: Introducing the Spirituality of Imam Ali* (London: I.B. Tauris, 2006).

baiat Ali dan menuntut balas atas kematian Utsman sebelum mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ketegangan antara keduanya memuncak dalam Perang Shiffin, yang berakhir dengan *arbitrase* yang hasilnya justru memperlemah posisi Ali bin Abi Thalib secara politik. Banyak pendukungnya kecewa terhadap putusan *arbitrase* ini, yang dianggap sebagai bentuk kompromi terhadap kebenaran. Dari situ, muncul kelompok Khawarij, yakni mantan pendukung Ali yang berbalik menentangnya karena dianggap telah menyimpang dari prinsip kebenaran dan tauhid.¹⁶ Kelompok ini juga menyatakan perang terhadap Ali bin Abi Thalib yang disebut Perang Nahrawan.

Dari sisi sosial, masyarakat Islam saat itu mengalami fragmentasi akibat perbedaan pandangan politik dan kepentingan suku. Sistem pemerintahan Utsman yang dipandang nepotistik menyebabkan ketimpangan sosial dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat non-Quraisy dan penduduk daerah. Ali bin Abi Thalib mencoba mengembalikan keadilan sosial dengan mengganti pejabat yang tidak amanah, dan mendistribusikan kekayaan negara secara merata. Namun, kebijakan ini justru memperbesar oposisi politik dari kalangan elite Quraisy yang merasa hak-haknya diabaikan.¹⁷

Kritiknya, Ali bin Abi Thalib sering dianggap terlalu idealis dalam menerapkan prinsip keadilan tanpa mempertimbangkan realitas politik. Meski kebijakannya konsisten secara moral, pendekatannya kurang pragmatis untuk konteks politik yang penuh intrik dan kompromi. Hal ini berbeda dengan pendekatan Muawiyah yang lebih fleksibel dan strategis dalam membangun kekuatan politik. Kekakuan Ali bin Abi Thalib dalam mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran menjadi pedang bermata dua, di satu sisi menunjukkan integritas, tetapi di sisi lain menyulitkannya untuk mempertahankan stabilitas kekuasaan.¹⁸

Meski menghadapi tekanan luar biasa, Ali bin Abi Thalib tetap menunjukkan karakter kepemimpinan yang kukuh. Ia tidak pernah menggunakan kekuasaan untuk balas dendam, tidak terjebak dalam politik transaksional, dan tetap konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Dalam suratnya kepada Malik al-Ashtar, Ali bin Abi Thalib menegaskan pentingnya memperlakukan rakyat secara adil dan tidak memperkaya diri melalui jabatan. Inilah warisan kepemimpinan yang menjadikannya tokoh panutan sepanjang masa, meskipun secara politis ia tidak mampu mempertahankan kekuasaan hingga tuntas.

Dengan demikian, tantangan politik dan sosial yang dihadapi Ali bin Abi Thalib mencerminkan dilema abadi dalam kepemimpinan: antara mempertahankan idealisme atau berkompromi demi stabilitas. Dalam konteks kekinian, pengalaman Ali menjadi cermin penting bagi pemimpin yang berusaha menegakkan keadilan di tengah dunia yang pragmatis dan penuh konflik kepentingan.

Warisan Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dalam Perspektif Kontemporer

Ali bin Abi Thalib (599–661 M) bukan hanya figur sentral dalam sejarah awal Islam, tetapi juga simbol kepemimpinan etis yang melampaui batas ruang dan waktu. Warisan kepemimpinannya menjadi relevan dalam konteks kontemporer, terutama di tengah krisis moral dan kepemimpinan di berbagai belahan dunia. Warisan

¹⁶Fred M Donner, *The Early Islamic Conquests* (Princeton: Princeton University Press, 1981).

¹⁷Marshall G. S. Hodgson, 'The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization' (Chicago: University of Chicago Press, 1974), p. 85.

¹⁸Sharif.

kepemimpinan Ali ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ia praktikkan dapat menjadi paradigma alternatif bagi tata kelola pemerintahan modern.

Pertama prinsip keadilan sosial (*'adl*) yang dipegang teguh oleh Ali bin Abi Thalib memiliki relevansi signifikan bagi negara modern. Dalam suratnya kepada Malik al-Asy'ar, Ali bin Abi Thalib menekankan pentingnya perlakuan setara terhadap semua warga negara, tanpa memandang status sosial, agama, atau afiliasi politik.¹⁹ Dalam konteks kontemporer, prinsip ini menjadi kritik terhadap praktik diskriminasi, politik identitas, dan ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di banyak negara berkembang maupun maju.

Kedua, konsep integritas dan amanah yang dijalankan Ali bin Abi Thalib merupakan fondasi utama tata kelola yang bersih (*good governance*). Ia menolak segala bentuk korupsi dan nepotisme, bahkan berani menegur pejabat dekat yang menyalahgunakan wewenang.²⁰ Dalam perspektif modern, sikap ini menginspirasi pembentukan sistem pengawasan publik, transparansi anggaran, dan akuntabilitas pejabat negara.

Ketiga, kesederhanaan dalam gaya hidup (*zuhd*) yang dicontohkan Ali mengandung pesan moral bagi pemimpin masa kini. Ali bin Abi Thalib tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, melainkan hidup sejajar dengan rakyat.²¹ Di era modern, kesederhanaan ini dapat dipandang sebagai strategi membangun kepercayaan publik, mengingat jarak sosial antara elite politik dan rakyat sering kali melebar karena gaya hidup mewah pejabat.

Keempat, prinsip musyawarah (*syūrā*) yang Ali bin Abi Thalib terapkan menunjukkan nilai demokratis dalam Islam. Ia mengundang pandangan dari berbagai kalangan sebelum mengambil keputusan strategis.²² Dalam konteks demokrasi modern, musyawarah ini sejalan dengan prinsip partisipasi publik, *checks and balances*, serta pengambilan kebijakan berbasis konsensus.

Kelima, ketegasan hukum yang dijalankan Ali bin Abi Thalib mengajarkan bahwa supremasi hukum adalah syarat mutlak bagi keberlangsungan negara. Ia menolak perlakuan istimewa terhadap keluarga atau sekutu politik dalam perkara hukum.²³ Dalam perspektif kontemporer, hal ini menjadi kritik terhadap praktik *rule by law* yang memanipulasi hukum untuk mempertahankan kekuasaan, dan menegaskan pentingnya *rule of law* yang imparsial.

Secara kritis, penerapan prinsip-prinsip Ali bin Abi Thalib di era modern memerlukan adaptasi kontekstual. Meskipun nilai-nilai moralnya universal, implementasinya harus disesuaikan dengan sistem politik, ekonomi, dan budaya setempat. Tantangannya adalah menghindari romantisme sejarah yang memisahkan warisan Ali bin Abi Thalib dari realitas struktural dan politik masa kini. Namun, jika dikelola dengan pendekatan yang progresif, warisan ini berpotensi menjadi fondasi etika publik global, melengkapi kerangka hukum dan administrasi modern yang sering kali kering dari nilai spiritual.

¹⁹Sayed Ali Reza Qum, 'Nahj Al-Balāghah', *World Organization for Islamic Services*, 1996, p. 429.

²⁰Al-Hadid.

²¹Shaban.

²²Watt.

²³Kennedy.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan global (*global governance*), prinsip-prinsip Ali bin Abi Thalib sangat sejalan dengan gagasan kepemimpinan etis dan berbasis nilai yang menjadi fokus banyak institusi internasional saat ini. Seperti yang dikemukakan oleh James MacGregor Burns dalam teorinya tentang *transformational leadership*, pemimpin sejati adalah mereka yang mampu mentransformasikan nilai-nilai masyarakat melalui keteladanan moral, bukan hanya kemampuan teknokratik. Ali bin Abi Thalib menunjukkan kepemimpinan transformatif ini dengan tetap memegang teguh nilai keadilan, bahkan ketika hal itu mengancam kekuasaannya sendiri.

Lebih jauh lagi, prinsip inklusivitas Ali juga sangat kontekstual dengan tuntutan zaman global yang plural dan majemuk. Ketika dunia saat ini bergulat dengan isu identitas, politik sektarian, dan polarisasi, Ali telah jauh hari menegaskan prinsip kemanusiaan yang inklusif. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa rakyat terdiri dari dua jenis: "mereka yang seiman denganmu atau mereka yang setara denganmu dalam kemanusiaan". Pernyataan ini sejajar dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Piagam PBB yang menekankan kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat semua individu.

Dalam dunia yang semakin global, pemimpin tidak hanya dituntut efektif secara politik dan ekonomi, tetapi juga harus menjunjung tinggi etika kepemimpinan lintas budaya dan agama. Warisan Ali bin Abi Thalib menghadirkan nilai-nilai yang melintasi batas-batas geografi dan agama. Ia memberikan inspirasi bahwa kepemimpinan yang berakar pada keadilan dan kasih sayang mampu merawat kemanusiaan dalam skala yang lebih luas. Oleh karena itu, warisan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dapat menjadi model bukan hanya untuk dunia Islam, tetapi juga bagi semua bangsa yang sedang mencari sistem kepemimpinan yang lebih etis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, warisan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib bukan hanya narasi masa lalu, tetapi sumber inspirasi strategis untuk membangun pemerintahan yang adil, bersih, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat di era kontemporer.

Kesimpulan

Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menghadirkan teladan yang melampaui ruang dan waktu. Dalam sejarah Islam, Ali bin Abi Thalib tidak hanya dikenang sebagai khalifah keempat, tetapi juga sebagai pemimpin yang menjadikan keadilan, integritas, keberanian moral, dan kepedulian sosial sebagai fondasi kebijakan publik. Jejak kepemimpinannya menunjukkan bahwa pemerintahan yang kokoh tidak lahir dari dominasi kekuasaan semata, melainkan dari komitmen terhadap nilai-nilai etis dan keberpihakan pada kesejahteraan rakyat.

Melalui keberaniannya menegakkan kebenaran, kebijaksanaan dalam menghadapi konflik, serta penghormatannya terhadap ilmu dan musyawarah, Ali bin Abi Thalib memperlihatkan model kepemimpinan yang relevan hingga masa kini. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip yang ia praktikkan dapat menjadi rujukan untuk membangun tata kelola yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, terutama di tengah tantangan etika dan kompleksitas sosial-politik global.

Dengan demikian, jejak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib bukan hanya bagian dari khazanah sejarah Islam, melainkan juga sumber inspirasi universal bagi setiap pemimpin yang ingin memadukan keberanian, kebijaksanaan, dan moralitas dalam menjalankan amanah kekuasaan.

Daftar Pustaka

- Ainur Riska Amalia, 'Sejarah Peradaban Islam : Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Masa Pemerintahan Dinasti Bani Abbasiyah', *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 10.01 (2022), 53-64 <<https://doi.org/10.24252/rihlah.v10i01.38405>>.
- Ali, Muhammad, 'Khulafaur Rasyidin', *The Early Caliphate (Khulafaur Rasyidin)*, 1.2 (2008), 1-260 <<http://aail.org/indonesia/indonesianbooksislamahmadiyya/muhammadali/khulafarasyidinearlycaliphate/khulafarasyidinearlycaliphate.pdf>>.
- Al-Asytar, Malik, *Nahjul Al-Balāghah* (Qum: World Organization for Islamic Services, 1996).
- Al-Azizi, Abdul Syukur, 'Sejarah Terlengkap Peradaban Islam', *Noktah*, 2017, p. 620.
- Al-Hadid, Ibn Abi, *Sharh Nahj Al-Balāghah* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, 1960).
- Al-Sharif al-Radhi, 'Nahjul Balaghah' (Jakarta: Lentera, 2005), p. 49.
- 'Buku Khulafaurasyidin Ibu Syamzan.Pdf'.
- Donner, Fred M, *The Early Islamic Conquests* (Princeton: Princeton University Press, 1981).
- Ely Zainudin, 'Peradaban Islam Pada Masa Khulafah Rasyidin', *Jurnal Intelegensia*, 03.01 (2015), 50-58 <<https://ejournal.unisnu.ac.id/JI/article/download/1337/1345>>.
- Hasyim, Syafiq, 'Etika Kepemimpinan Dalam Islam', *Kompas*, 2019, p. 39.
- Hodgson, Marshall G. S., 'The Venture of Islam : Conscience and History in a World Civilization' (Chicago: University of Chicago Press, 1974), p. 85.
- Jurnal, Carita, Saidin Hamzah, and Ali Bin, 'Khulafah Al- Rasyidun : Masa Kepemimpinan Ali Bin Abi Thalib', 2022, 129-38.
- Kennedy, Hugh, *The Prophet and the Age of the Caliphates* (London: Longman, 2004).
- Krippendorff, Klaus, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2013).
- Marzuenda, Marzuenda, "Sejarah Perkembangan Peradaban Islam" *Jurnal Ilmia Pendidikan Islam* 10,No.1 (2021): 4', *Kreatifitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 10.1 (2021), 1-9.
- Moleong, Lexy J., 'Metodologi Penelitian Kualitatif' (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), p. 89.
- Noor, Muhammad, Muhammad Husni, Muhammad Iqbal, Iain Palangka Raya, and Palangka Raya, 'Syams : Jurnal Studi Keislaman Structuration in the Leadership of Caliph Ali Bin Talib Strukturasi Dalam Kepemimpinan Khalifah Ali Bin Thalib', 3.November (2022), 198-220.
- Pemerintahan, Masa, A L I Bin, A B I Thalib, and Dari Tahun, 'Masa Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib Dari Tahun 655-660m', 2023, 111-18.
- Qum, Sayed Ali Reza, 'Nahj Al-Balāghah', *World Organization for Islamic Services*, 1996, p. 429.
- Radhi, Syekh Syarif, *Nahjul Balagha* (Diva Press, 2021).Shaban, M.A., *Islamic History: A New Interpretation* (Cambridge: Cambridge University Press, 1971).
- Shah-Kazemi, Reza, *Justice and Remembrance: Introducing the Spirituality of Imam Ali* (London: I.B. Tauris, 2006).
- Sharif, M. M., *A History of Muslim Philosophy*, Vol. 1 & 2 (Wiesbaden: Otto

- Harrassowitz, 1981).
- Syukur, Syamzan, *Sukses Kepemimpinan Dan Transformasi Kekuatan Politik Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin* (Makassar: Alauddin University Press, 2020).
- Watt, Montgomer, William, *Ali Ibn Abi Talib. In: Muhammad: Prophet and Statesman* (Inggris: Oxford University Press, 1960).
- Watt, W Montgomery, *The Formative Period of Islamic Thought* (Oxford: Oneworld, 1998).